

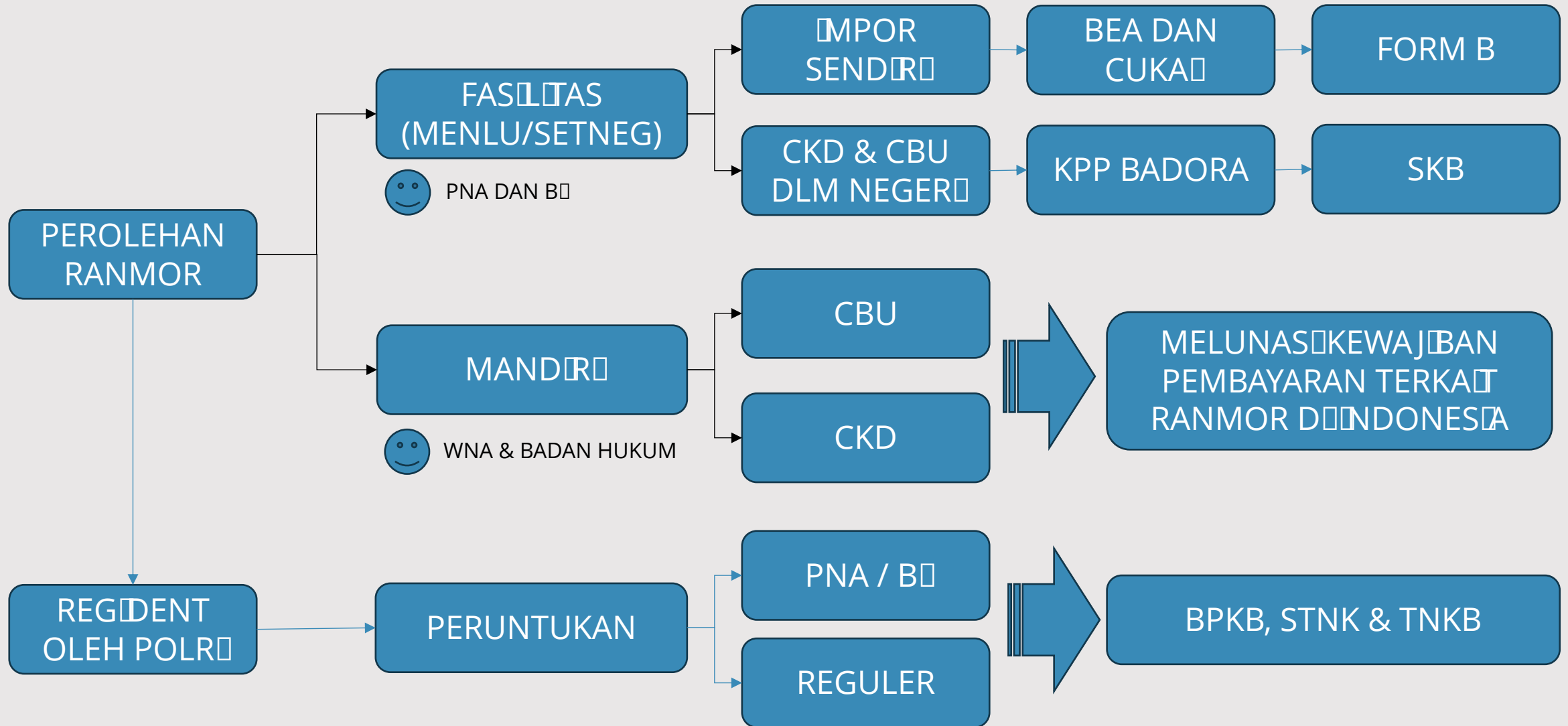


# **REGIDENT RANMOR ASING DAN KEPEMILIKAN OLEH ORANG ASING**

**DIREKTORAT REGIDENT KORLANTAS POLRI**

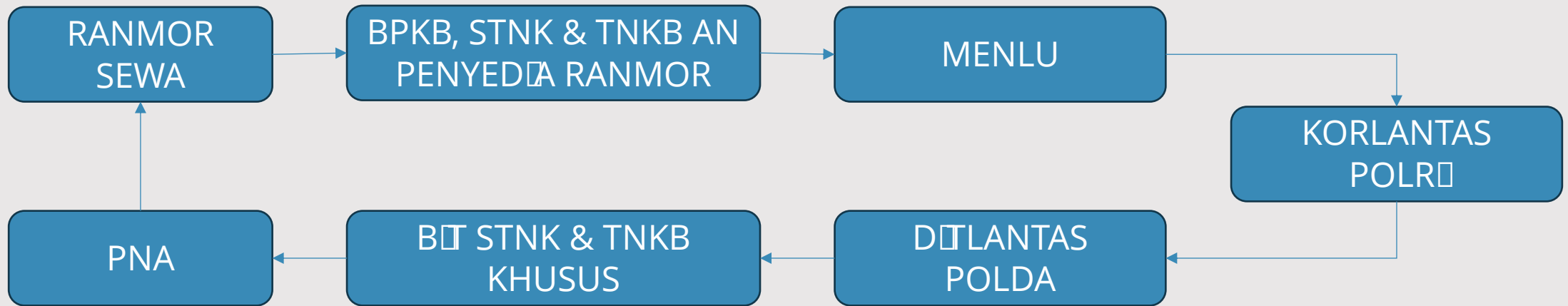
1. UU NO. 37/1999 TTG HUBUNGAN LUAR NEGERI;
2. UU NO. 2/2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
3. UU NO. 22/2009 TTG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN;
4. PP NO. 55/2012 TTG KENDARAAN;
5. PP NO. 47/2015 TTG PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA
6. PERMENKEU NO.160/PMK.03/2014 TTG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAK YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN PEMBEBASAN OLEH PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA;
7. PERMENKEU NO.161/PMK.03/2014 TTG TATA CARA PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG TELAH DIPUNGUT KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA;
8. PERMENKEU NO.162/PMK.03/2014 TTG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA;
9. PERMENKEU NO.148/PMK.04/2015 TTG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIOANL BESERTA PEJAKATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA;
10. PERMENKEU NO.149/PMK.04/2015 TTG PEMBEASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA;
11. PERPOL NO. 7/2021 TTG REGIDENT RANMOR;
12. SURAT KAPOLRI NO: B/936/I/YAN.1.2./2023/KORLANTAS KPD MENLU REPUBLIK INDONESIA HAL PEMBERITAHUAN PENERBITAN STNK DAN TNKB KHUSUS BAGI RANMOR KORPS DIPLOMAT DAN KORPS KONSULAT.

# REGIDENT RANMOR WNA, PNA DAN BI



# REGIDENT RANMOR PNA PEROLEHAN SEWA

---



- KODE REG KHUSUS (CD/CC)
- MASA BERLAKU :
  - ✓ PALING LAMA 1 TAHUN
  - ✓ MASA KONTRAK
  - ✓ PENGESAHAN STNK

# REGIDENT RANMOR ASING

## RANMOR ASING

RANMOR YANG TEREKISTRASI PD NEGARA ASING YANG DIOPERASIKAN DI WIL HUKUM INDONESIA

## BERDASARKAN PERTIMBANGAN KEPENTINGAN

RANMOR ASING YANG DIGUNAKAN UTK:

1. ANGKUTAN ANTAR NEGARA;
2. KEGIATAN PERTEMUAN ANTAR NEGARA, MISI KEMANUSIAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DI INDONESIA;
3. KEPENTINGAN SOSIAL EKONOMI PADA DAERAH YANG MEMILIKI KETERBATASAN INFRASTRUKTUR ATAS REKOMENDASI DARI PEMERINTAH DAERAH; DAN/ATAU
4. PENGAMANAN PEJABAT NEGARA ASING BERDASARKAN REKOMENDASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN ATAU KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

## DILAKS REGIDENT RANMOR KHUSUS

DITERBITKAN STNK  
LBN DAN TNKB LBN

BERLAKU 30 HARI DAN DAPAT  
DIPERPANJANG MAKS 6 KALI

HANYA DPT DIOPERASIKAN PD  
PROVINSI PENERBITAN

# PENGECUALIAN PENERBITAN STNK LBN DAN TNKB LBN

**RANMOR ASING**

RANMOR YANG TEREGISTRASI PD NEGARA ASING YANG DIOPERASIKAN DI WIL HUKUM INDONESIA

RANMOR KEDUBES INDONESIA

RANMOR ASING UTK PEJABAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN DAN PEJABAT SETINGKAT ,MENTERI

RANMOR KEPOLISIAN NEGARA ASING

RANMOR ASING DARI WILAYAH DENGAN PERJANJIAN KHUSUS (SOSEK MALINDO)

RANMOR DIPLOMAT ASING

RANMOR ASING DENGAN CARNET REKOM IMI

**TETAP DI  
DATA/DIREGISTRASI TETAPI  
TIDAK DITERBITKAN STNK  
LBN DAN TNKB LBN**

**PENGECUALIAN**

**DILAKS REGIDENT  
RANMOR KHUSUS**

DITERBITKAN STNK  
LBN DAN TNKB LBN

BERLAKU 30 HARI DAN DAPAT  
DIPERPANJANG MAKS 6 KALI

HANYA DPT DIOPERASIKAN PD  
PROVINSI PENERBITAN

# REGIDENT RANMOR ORANG ASING

**PERORANGAN ASING  
(WNA) DI INDONESIA**

**WARGA NEGARA ASING YANG BERADA PADA WILKUM INDONESIA**

**BADAN HUKUM ASING DI  
INDONESIA**

**BADAN HUKUM ASING YANG BERKANTOR TETAP DI INDONESIA**

**DILAKSANAKAN REGIDENT  
RANMOR (REGULER)**

**PERORANGAN ASING  
(WNA) DI INDONESIA**

**MELAMPIRKAN**

**KITAS**

**SURAT KET TEMPAT TINGGAL**

**KITAP**

**KTP-EL**

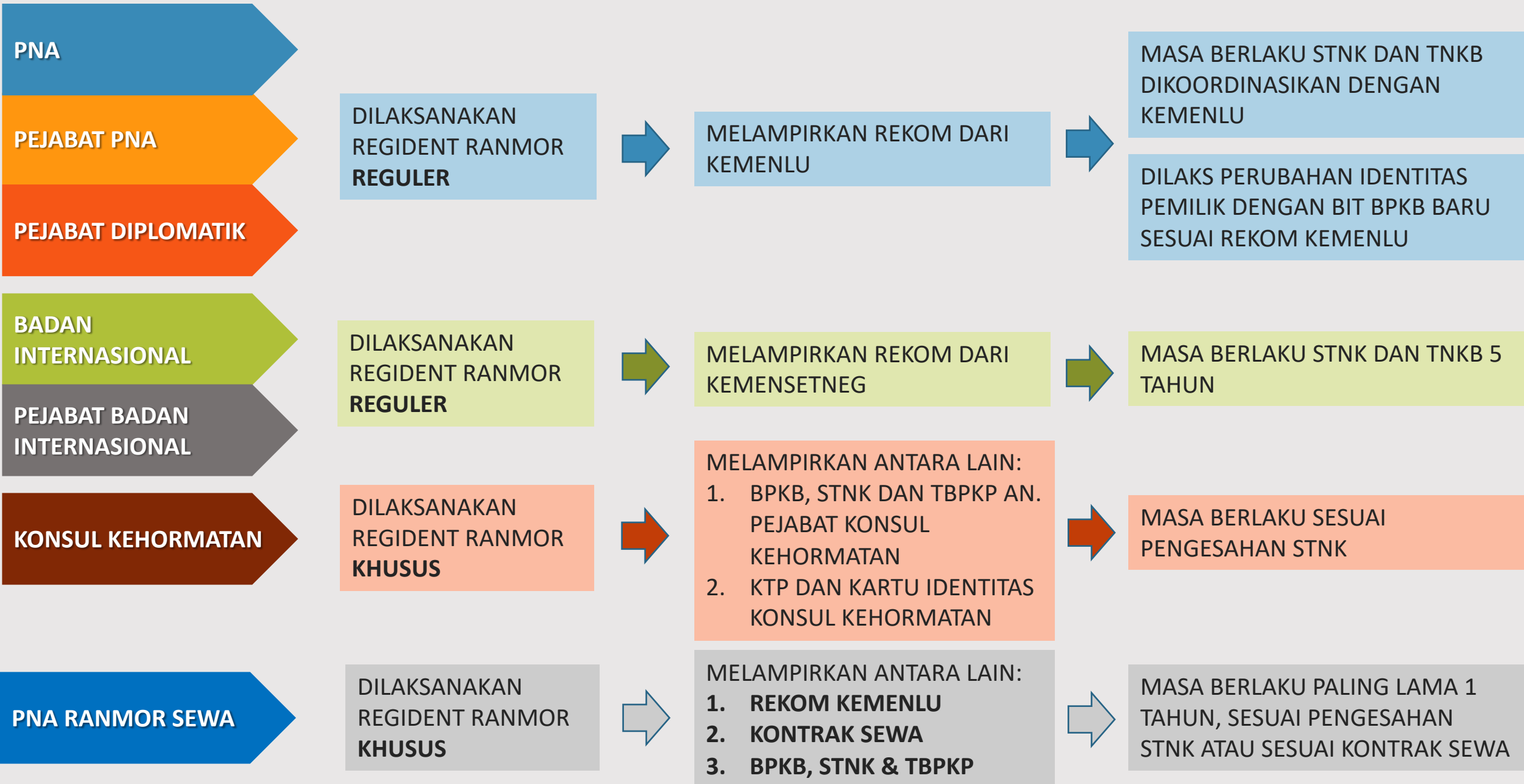
**MASA BERLAKU STNK SAMA  
DENGAN TNKB (5 TAHUN)**

**BADAN HUKUM ASING  
DI Indonesia SESUAI  
DGN PERATURAN PER  
UU-AN**

**MELAMPIRKAN**

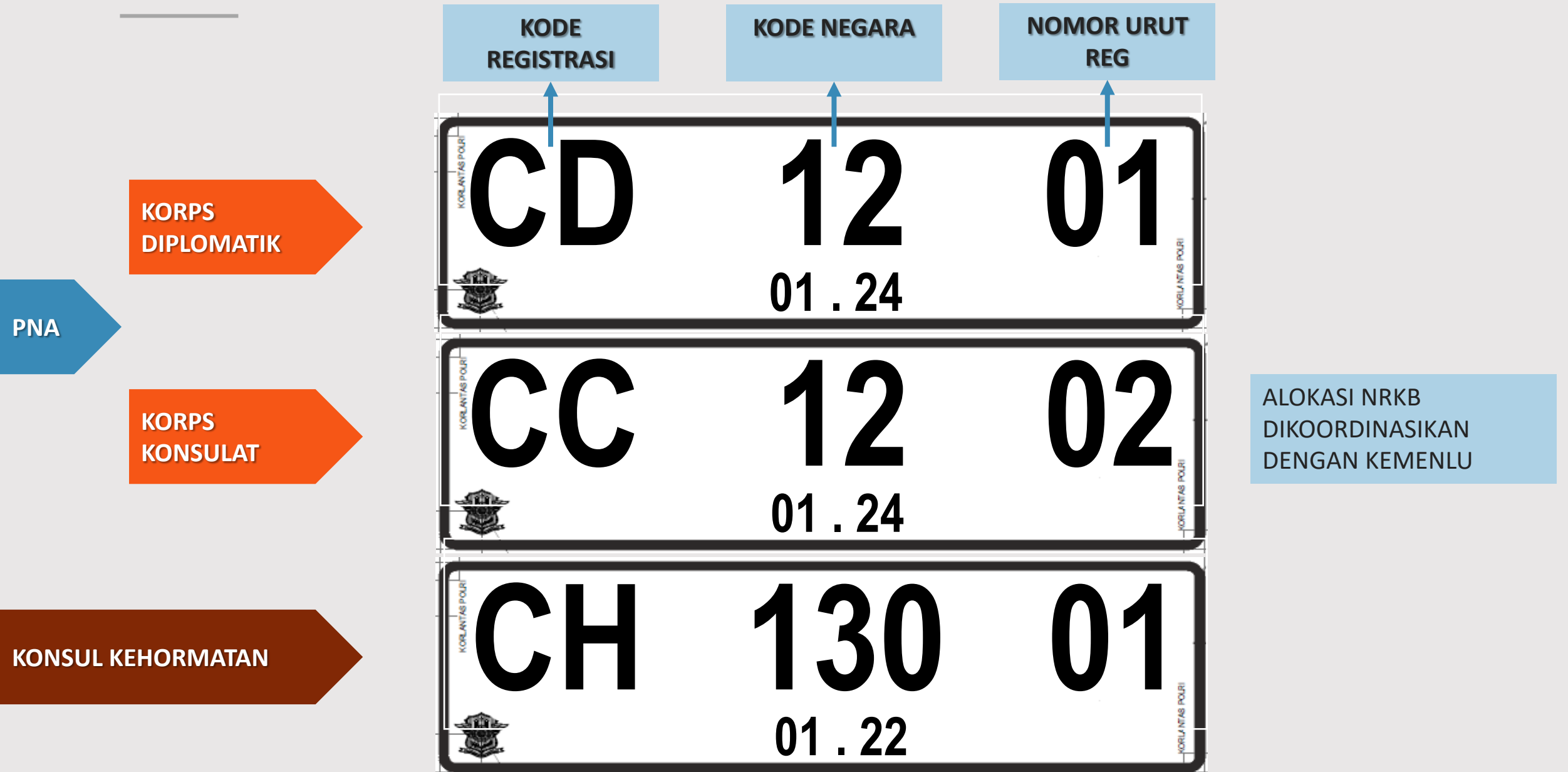
1. NIB
2. NPWP
3. SUKET TTD PIMPINAN DAN KOP  
BADAN HUKUM

# REGIDENT RANMOR PNA, BADAN INTERNASIONAL DAN PEJABATNYA





# NRKB PNA (KORPS DIPLOMATIK DAN KORPS KONSULAT) DAN KONSUL KEHORMATAN



# STNK LBN DAN TNKB LBN

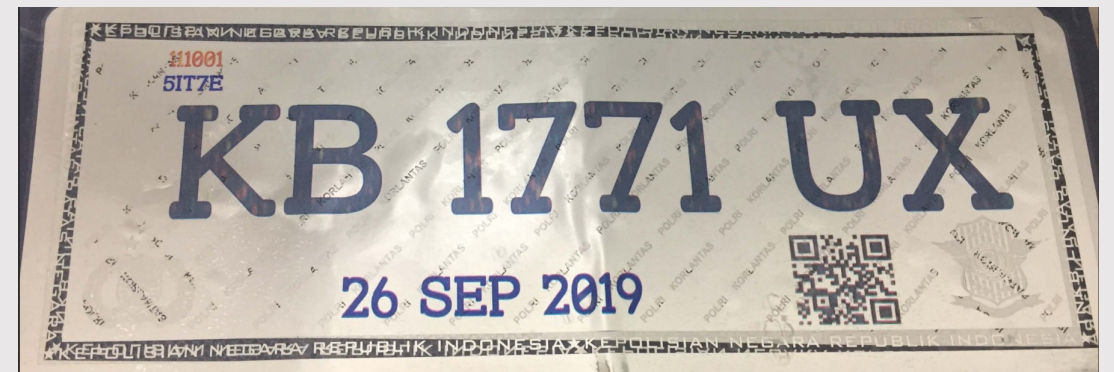
## STNK LBN

DOKUMEN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BUKTI LEGALITAS DAN LEGITIMASI PENGOPERASIAN SEMENTARA RANMOR ASING DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.



## TNKB LBN

TANDA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BUKTI LEGITIMASI PENGOPERASIAN SEMENTARA RANMOR ASING YANG MENGGUNAKAN STNK LBN.



# ALOKASI NRKB STNK LBN DAN TNKB LBN

NO.	TUJUAN PENGOPERASIAN	SUSUNAN NRKB			
		KODE WIL	NO URUT REGISTRASI	KODE PENGOPERASIAN	
				PERKAP 5 2012	PERPOL 7 2021
1.	ANGKUTAN ANTAR NEGARA	SESUAI KODE WIL MASING- MASING	SESUAI JENIS RANMOR:\ 1. SEPEDA MOTOR 2. MOBIL PENUMPANG 3. MOBIL BUS 4. MOBIL BARANG 5. KENDARAAN KHUSUS	AX SD ZX KECUALI ALOKASI STCK DAN RANMOR FORM B	AK
2.	MISI KEMANUSIAAN				MK
3.	PERTEMUAN ANTAR NEGARA				PN
4.	PARIWISATA, OLAH RAGA, MISI SOSIAL				MS
5.	PENGAMANAN PEJABAT NEGARA ASING				PAM

# TARIF DAN JENIS PNBP BPKB, STNK DAN TNKB

PP 76 THN 2020 TTG JENIS DAN TARIF ATAS PNBP YANG BERLAKU PADA POLRI

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
<b>BPKB R2 BARU/PERGANTIAN</b>	<b>PER BIT</b>	<b>RP. 225.000,-</b>
<b>BPKB R4 BARU/PERGANTIAN</b>	<b>PER BIT</b>	<b>RP. 375.000,-</b>
STNK R2 BARU	PER BIT	RP. 100.000,-
STNK R2 PERPANJANGAN	PER BIT	RP. 100.000,-
STNK R4 BARU	PERBIT	RP. 200.000,-
STNK R4 PERPANJANGAN	PER BIT	RP. 200.000,-
<b>TNKB R2/3</b>	<b>PER PASANG</b>	<b>RP. 60.000,-</b>
<b>TNKB R4/LEBIH</b>	<b>PER PASANG</b>	<b>RP. 100.000,-</b>

# TARIF DAN JENIS PNBP STNK LBN DAN TNKB LBN

PP 76 THN 2020 TTG JENIS DAN TARIF ATAS PNBP YANG BERLAKU PADA POLRI

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
STNK – LBN R 2/3		
<input type="checkbox"/> BARU	PER BIT	RP. 100.000,-
<input type="checkbox"/> PERPANJANGAN	PER BIT	RP. 100.000,-
STNK – LBN R 4/LEBIH		
<input type="checkbox"/> BARU	PER BIT	RP. 200.000,-
<input type="checkbox"/> PERPANJANGAN	PER BIT	RP. 200.000,-

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
TNKB-LBN R 2/3	PER PASANG	RP. 100.000,-
TNKB-LBN R 4/LEBIH	PER PASANG	RP. 200.000,-



# Contoh Bit STNK & TNKB Khusus untuk Konsul Kehormatan



MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KORPS LALU LINTAS  
Jalan Letjend MT. Haryono Kav. 37-38 Jakarta 12770

Jakarta, 29 September 2023

Nomor : B/1926/IX/YAN.1.2./2023/SUS/DITREGIDENT  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : penerbitan STNK dan TNKB KHUSUS

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN  
DAERAH JAWA TIMUR  
Di  
Surabaya

u.p. Diriantas

## 1. Rujukan:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- Surat Kapolri Nomor: B/653/II/YAN.1.2./2023/Korlantas tanggal 24 Januari 2023 Kepada Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri perihal Penerbitan STNK dan TNKB Rahasia dan Khusus.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, bersama ini disampaikan sebagai persyaratan penerbitan dan pencetakan STNK dan TNKB KHUSUS untuk proses penerbitan BARU, berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh KEMENLU Nomor: III/00059/FD-NP/08/2023/M/65 tanggal 31 Agustus 2023, dengan identitas sebagai berikut:

- NRKB : L 1719 BAW
- Atas Nama : KONSUL KEHORMATAN AUSTRIA DI SURABAYA
- Alamat : JL. EMBONG MALANG 85-89 SURABAYA
- Jenis/Merek/Tipe : MB. PENUMPANG/TOYOTA/VILLFIRE 2.5G AT
- Nomor Rangka : JTNGF3DH0H8008431
- Nomor Mesin : 2ARH844128
- Tahun Pembuatan : 2017
- Email : austrian.consul@sby.centrin.net.id
- No. HP : 08315316000

Bersamaan dengan hal tersebut diberikan izin dengan alokasi:

- NRKB KHUSUS : CH 56 701
- Berlaku s.d. : 08 Agustus 2024

3. Dalam pelaksanaan proses penerbitan STNK dan TNKB KHUSUS, agar berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana angka 1 (satu) huruf b dan c di atas.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

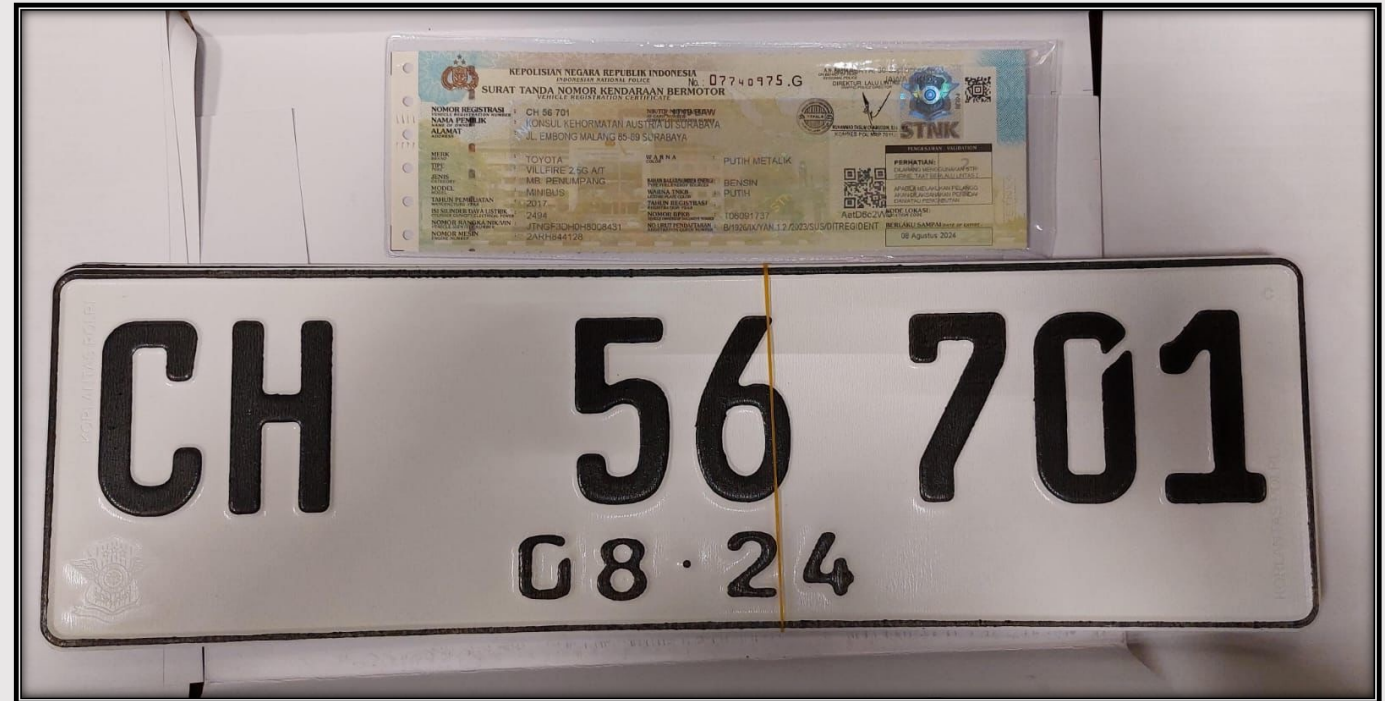
a.n. KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI  
DIR REGIDENT



Drs. YUSRI YUNUS  
BRIGADIR JENDERAL

Tembusan:

- Kabaintelkam Polri;
- Kakorlantas Polri;
- Kapolda JAWA TIMUR.



## SARAN DAN MASUKAN :

---

1. AGAR SEMUA PIHAK TURUT SERTA DALAM PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN RANMOR EKS DUBES ATAU BI KPD PEMILIK BARU UTK SEGERA MELAKUKAN KEWAJIBAN PELUNASAN DAN REGISTRASI PERUBAHAN KEPEMILIKAN RANMOR PADA POLRI;
2. POLRI MENGIZINKAN PENGGUNAAN RANMOR SEWA YG DIPERGUNAKAN OLEH PNA, TETAP DITERBITKAN STNK DAN TNKB CC/CD;
3. REKOM UTK DUBES YG PEROLEHAN RANMOR SEWA DAN KONHOR DIAJUKAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KE KORLANTAS POLRI;
4. AGAR KEMENTERIAN TERKAIT MENYERTAKAN KONTAK PERSON DAN EMAIL DUBES/BI/KONHOR DLM REKOM GUNA KONFIRMASI PNBP MAUPUN HAL TERKAIT DGN KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN.

**TERIMA KASIH**

---

**DITREGIDENT KORLANTAS POLRI**